

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Studi

Rencana Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya air di Indonesia. Di bawah Rencana Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang tahap pertama (1969-1993), sektor pengembangan sumberdaya air telah mencapai hasil yang luar biasa dengan sasaran keseluruhan yakni penyediaan swasembada beras, yang merupakan kebutuhan pangan utama di Indonesia. Arah pengembangan sumber daya air dalam Rencana tahap kedua (1994-2019) lebih terarah kepada peningkatan pasokan kapasitas sumberdaya air untuk memenuhi permintaan bagi rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata dan hydropower, dan untuk mempromosikan secara efektif atas pengalokasian air.

Setelah krisis moneter tahun 1997, Pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Oktober 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk lima tahun-an dari 1999-2004. Sejalan dengan arahan global yang tertuang dalam GBHN, Program Pembangunan Nasional Lima tahunan (PROPENAS) 2000-2004 dipersiapkan di bulan Agustus tahun 2000. PROPENAS memfokuskan pada dua landasan permasalahan ekonomi; yaitu globalisasi dan desentralisasi. Undang-undang No. 22 /1999 (Undang-undang Administratif Daerah) dan Peraturan Pemerintah No. 25 /1999 (Keseimbangan Anggaran antara pemerintah pusat dan daerah) yang sudah ditetapkan pada saat ini, dengan demikian Indonesia mengambil langkah yang besar yakni Desentralisasi.

Berdasarkan latar belakang nasional ini, pengelolaan sumberdaya air ini dialihkan dari “prakarsa propinsi dan nasional” ke “prakarsa kerjasama air daerah, kota,”. Lebih jauh lagi, dengan suatu pemikiran bahwa pengelolaan daerah aliran sungai harus dibina dengan menggunakan konsep “satu daerah aliran sungai, satu rencana dan satu pengelolaan” restrukturisasi organisasi untuk menyatukan pengelolaan daerah aliran sungai dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting. Desentralisasi menerapkan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengurus aktivitas daerahnya masing-masing, dengan demikian, kapasitas binaan untuk pegawai pemerintah daerah sangat diperlukan.

Daerah aliran sungai Musi terletak di bagian selatan Pulau Sumatra dengan panjang keseluruhan dan luas keseluruhan area cakupan kira-kira 640 km dan 60.000 km², secara berturut-turut. Sebagian besar, daerah aliran sungai yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Daerah aliran tersebut memiliki beraneka ragam permasalahan dan belum adanya kelayakan pengelolaan air di daerah aliran. Pada masa desentralisasi saat ini di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan dan masing-masing kabupaten dan kota memerlukan pembuatan rencana induk di berbagai bidang dan untuk mempromosikan pembangunan regional. Oleh karena itulah, penetapan rencana induk pengelolaan air secara menyeluruh pada daerah aliran sungai Musi dianggap sangat penting.

Dalam menanggapi permintaan dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang mengutus perwakilan melalui sebuah tim studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pada tanggal 5 Agustus 2002, untuk melaksanakan “Studi Pengelolaan Air secara Menyeluruh di DAS Musi” (selanjutnya disebut “JICA Study”). Rencana Pengelolaan kemudian dirumuskan, sebagai hasil JICA Study, dalam kerja sama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut Dirjen SDA), Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah termasuk instansi terkait lainnya.

1.2 Tujuan Studi

Adapun tujuan dari studi ini, yakni:

- (1) Untuk mempersiapkan Rencana Induk Pengelolaan Air Secara Menyeluruh pada Daerah Aliran Sungai Musi di Indonesia; dan,
- (2) Untuk mengadakan kegiatan alih teknologi kepada pihak counterpart yang terlibat dalam Studi.

1.3 Wilayah Studi

Wilayah studi yang dipilih yaitu Daerah Aliran Sungai Musi di sebelah selatan Pulau Sumatra, Indonesia (lihat Peta Lokasi).

1.4 Jadwal Studi

Jadwal keseluruhan studi akan disajikan dalam **Gambar 1.4.1**.

| Perihal | 2002 | | | | | | 2003 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-----|------------|--------|--------------|-------------|----------|
| | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
| Pekerjaan di Indonesia | | Pertama | | | | | Kedua | | | | | Ketiga | | | |
| Pekerjaan di Jepang | Persiapan □ | | | | Pertama □ | | | | | | Kedua □ | | | Ketiga □ | |
| Pelaporan | | ▲ IC/R | | | ▲ PR/R | | | ▲ IT/R | | | | | ▲ DF/R | | ▲ F/R |
| Rapat Panitia Pengarah | | ▲ IC/R | | ▲ Kemajuan awal | ▲ PR/R | | | ▲ IT/R | | | | | ▲ DF/R | | |
| Konsultasi Publik | | | ★ Pra P/C | | ★ P/C (1) | | | ★ P/C (2) | | | | | | | |
| Seminar | | | | | | | | | | | | | ★ Seminar | | |

Keterangan: IC/R: Laporan Insepsi PR/R: Laporan Kemajuan IT/R: Laporan Sementara
DF/R: Draft Laporan Akhir F/R: Laporan Akhir P/C: Konsultasi Publik

Gambar 1.4.1 Jadwal Studi Keseluruhan

1.5 Organisasi Pelaksanaan Studi

Tim Studi terdiri dari sebelas tenaga ahli yang diorganisir oleh JICA. Dipihak Indonesia Dinas PU Pengairan Sumatera Selatan menunjuk counterpart. Selain itu Dirjen SDA juga membentuk Panitia Pengarah, Tim koordinasi/Supervisi dan counterpart untuk membantu dan memberi pertimbangan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan studi serta alih teknologi.